



TESIS

Judul:

KEDUDUKAN HUKUM ANTARA AKTA JUAL BELI
DAN SHGB DALAM SUATU SENGKETA
KEPEMILIKAN
(Studi Kasus Putusan No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks jo.
Putusan No. 591/PDT/2022/PT.BDG)

Disusun oleh:

GERARDUS ALDO SALIM
NIM. 217211032

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

KEDUDUKAN HUKUM ANTARA AKTA JUAL BELI DAN SHGB
DALAM SUATU SENGKETA KEPEMILIKAN
(Studi Kasus Putusan No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks jo. Putusan No.
591/PDT/2022/PT.BDG)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun oleh:
Gerardus Aldo Salim
NIM 217211032

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2024

Pengesahan

Nama : GERARDUS ALDO SALIM
NIM : 217211032
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : KEDUDUKAN HUKUM ANTARA AKTA JUAL BELI DAN SHGB DALAM SUATU SENGKETA KEPEMILIKAN (Studi Kasus Putusan No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks jo. Putusan No. 591/PDT/2022/PT.BDG)
Title : LEGAL STANDING BETWEEN DEED OF SALE AND PURCHASE AND BUILDING USE CERTIFICATE IN AN OWNERSHIP DISPUTE (Case Study of Decision No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks jo. Decision No. 591/PDT/2022/PT.BDG)

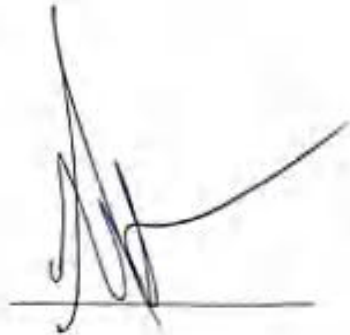
Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 17-Januari-2024.

Tim Penguji:

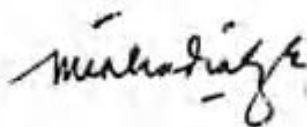
1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., MH., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 17-Januari-2024
Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.

Persetujuan

Nama : GERARDUS ALDO SALIM
NIM : 217211032
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : KEDUDUKAN HUKUM ANTARA AKTA JUAL BELI DAN
SHGB DALAM SUATU SENGKETA KEPEMILIKAN
(Studi Kasus Putusan No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks jo.
Putusan No. 591/PDT/2022/PT.BDG)

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 05-Januari-2024

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



ABSTRAK

- (A) Nama : Gerardus Aldo Salim
- (B) Judul Tesis : KEDUDUKAN HUKUM ANTARA AKTA JUAL BELI DAN SHGB DALAM SUATU SENGKETA KEPEMILIKAN
(STUDI KASUS PUTUSAN No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks jo. Putusan No. 591/PDT/2022/PT.BDG)
- (C) Halaman : ± 150
- (D) Kata Kunci : Sertifikat Hak Guna Bangunan, Akta Jual Beli, Kedudukan Hukum.

Sebuah alas kepemilikan atas sebidang tanah memiliki beberapa jenis dan sifat. Salah satu bukti peralihan hak atas tanah adalah Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang mana akan ditingkatkan menjadi berbagai jenis hak atas tanah berupa sertifikat, salah satunya adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang mempunyai jangka waktu. Kepemilikan tanah tersebut diatur menurut Undang-Undang sesuai alas hak terkait dan mendapatkan bukti kepemilikan. Putusan No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks jo. Putusan No. 591/PDT/2022/PT.BDG mempunyai kekuatan hukum yang berbeda karena pada Putusan No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks., memutus bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang habis masa berlakunya masih memiliki kedudukan dan kekuatan hukum, sedangkan pada Putusan 591/PDT/2022/PT.BDG mengesahkan Akta Jual Beli Nomor 315/AD/2/Jatiasih/1994 dan menetapkan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7/Bojong Menteng tidak memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan perbedaan antara kedua putusan ini yang mempertimbangkan permasalahan kedudukan alas hak atas suatu objek tanah, maka penulis mengangkat judul Tesis yaitu “KEDUDUKAN HUKUM ANTARA AKTA JUAL BELI DAN SHGB DALAM SUATU SENGKETA KEPEMILIKAN (Studi Kasus Putusan No. 571/Pdt.G/2021/PN.BKS jo Putusan No. 591/PDT/2022.PT.BDG).

Penulis merasa bahwa harus ada penelitian secara mendalam untuk dapat menjawab rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah kedudukan hukum antara akta Bagaimanakah kedudukan hukum antara Akta Jual Beli dibandingkan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah habis masa berlakunya terhadap objek tanah yang sama berdasarkan Putusan No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks., jo. Putusan No. 591/PDT/2022/PT.BDG? 2. Bagaimanakah akibat hukum antara Akta Jual Beli dibandingkan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah habis masa berlakunya terhadap objek tanah yang sama berdasarkan Putusan No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks jo. Putusan No. 591/PDT/2022/PT.BDG?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Mengetahui, mengkaji dan menganalisis terhadap kedudukan hukum Akta Jual Beli dibandingkan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah habis masa berlakunya terhadap objek tanah yang sama berdasarkan Putusan No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks., jo. Putusan No. 591/PDT/2022/PT.BDG.; 2. Mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum Akta Jual Beli dibandingkan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah habis masa berlakunya terhadap objek tanah yang sama berdasarkan Putusan No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks., jo. Putusan No. 591/PDT/2022/PT.BDG.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa: 1. Kedudukan hukum antara Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang telah habis masa berlaku dan Akta Jual Beli (AJB) terhadap

objek tanah yang sama berdasarkan Putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PN.Bks., yang memenangkan kedudukan hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria adalah merupakan kekeliruan Majelis Hakim dalam mengeluarkan pertimbangan hukum tanpa menilai fakta-fakta hukum yang ada secara keseluruhan. Di sisi lain, Putusan Nomor 591/PDT/2022/PT.BDG., yang manerangkan bahwa Akta jual Beli (AJB) Nomor 315/AD/2/Jatiasih/1994 adalah sah dan berharga, karena didukung oleh dokumen-dokumen serta fakta hukum yang menunjukan bahwa benar objek tanah dalam sengketa tidak termasuk dalam cakupan wilayah pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB); 2. Bahwa akibat hukum Antara Akta Jual Beli (AJB) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang telah habis masa berlakunya terhadap objek tanah yang sama berdasarkan putusan No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks., *jo.* Putusan No. 591/PDT/2022/PT.BDG., bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang telah habis masa berlakunya tidak bisa menjadi menjadi alas hak lagi.

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian ini adalah bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 591/ PDT/2022/PT BDG., tanggal 10 November 2022, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 571/Pdt.G/2021/PN Bks., tanggal 8 Agustus 2022, menunjukan beberapa perbedaan pendapat dalam pertimbangan hukumnya, diantaranya: a. Perbedaan mengenai objek sengketa; b. Perbedaan mengenai para pihak yang bersengketa; c. Perbedaan mengenai *asas nebis in idem*. Selain itu, Tindakan penguasaan yang dilakukan oleh PT. Bangun Tjipta Pratama sebagai pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7/Bojong Menteng dari hasil dari *Ruislag* Kementerian Pekerjaan Umum merupakan tindakan yang memenuhi unsur suatu perbuatan melawan hukum, dimana alas hak kepemilikan tanah terebut berada di tanah milik Rekson Sitorus. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Bekasi yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.7/Bojong Menteng di atas tanah milik Rekson Sitorus yang mana mengakibatkan Rekson Sitorus sebagai pemilik yang berhak atas objek tanah tersebut tidak dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah kepada negara.

Kata Kunci: Sertifikat Hak Guna Bangunan, Akta Jual Beli, Kedudukan Hukum.

(E) *Daftar Acuan* : 50 (1950 – 2023)

(F) *Pembimbing* : Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H

(G) *Penulis* : Gerardus Aldo Salim

ABSTRACT

- (A) *Name* : Gerardus Aldo Salim
- (B) *Thesis Title* : *LEGAL STANDING BETWEEN DEED OF SALE AND PURCHASE AND BUILDING USE CERTIFICATE IN AN OWNERSHIP DISPUTE*
- (Case Study of Decision No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks jo. Decision No. 591/PDT/2022/PT.BDG)
- (C) *Pages* : ± 150
- (D) *Keywords* : Building Use Rights Certificate, Legal Standing, Sale and Purchase Deed

A basis for ownership of a piece of land has several types and characteristics. One proof of the transfer of land rights is the Deed of Sale and Purchase (AJB) made by the Land Deed Official (PPAT), which will be upgraded to various types of land rights in the form of certificates, one of which is the Building Use Rights Certificate (SHGB) which has time period. Land ownership in Indonesia is regulated by the law in order to obtain proof of ownership. Decision No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks jo. Decision No. 591/PDT/2022/PT.BDG. have different verdicts, in which Decision No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks., ruled that the Building Use Rights Certificate (SHGB) which had expired, still has legal standing and enforceable by law, whereas in Decision 591/PDT/2022/PT.BDG., ratified the Deed of Sale and Purchase Number 315/AD/2/Jatiasih/1994 and declared that the Building Use Rights Certificate (SHGB) Number 7/Bojong Menteng has no legal standing and unenforceable by the law. Based on the differences between these two decisions which consider the issue of legal standing of a land, the author shall write a thesis with the title, namely "LEGAL STANDING BETWEEN DEED OF SALE AND PURCHASE AND BUILDING USE CERTIFICATE IN AN OWNERSHIP DISPUTE (Case Study of Decision No. 571/Pdt.G/2021/ PN.BKS. jo. Decision No. 591/PDT/2022.PT.BDG).

The author feels that there must be in-depth research to be able to answer the problem formulation as follows: 1. What is the legal standing of the Sale and Purchase Deed compared to the Building Use Rights Certificate which had expired for the same land object based on Decision No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks., jo. Decision No. 591/PDT/2022/PT.BDG? 2. What are the legal consequences between the Sale and Purchase Deed compared with the Building Use Rights Certificate which had expired for the same land object based on Decision No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks jo. Decision No. 591/PDT/2022/PT.BDG?

The objectives of this research are: 1. To study and analyze the legal position of the Sale and Purchase Deed compared to the Building Use Rights Certificate which had expired for the same land object based on Decision No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks., jo. Decision No. 591/PDT/2022/PT.BDG.; 2. To study and analyze the legal consequences of the Sale and Purchase Deed compared to the Building Use Rights Certificate which had expired for the same land object based on Decision No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks., jo. Decision No. 591/PDT/2022/PT.BDG.

The results of this research are that: 1. The legal standing between the Building Use Rights Certificate (SHGB) which had expired and the Sale and Purchase Deed (AJB) for the same land object is based on 2 (two) different decisions and resulting in 2 (two) different

verdicts. Firstly, Decision Number 571/Pdt.G/2021/PN.Bks., ruled that the legal standing of the Building Use Rights Certificate (SHGB) for PT Bangun Tjipta Pratama is in accordance with the Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Law, was a misjudgment by the Panel of Judges due to their incompetence in issuing the verdict without assessing the existing legal facts as a whole. On the other hand, Decision Number 591/PDT/2022/PT.BDG., ruled that the Deed of Sale and Purchase (AJB) Number 315/AD/2/Jatiasih/1994 is valid and enforceable by law, because it is supported by documents and legal facts which show that it is true that the land in dispute is not included in the area coverage of the Building Use Rights Certificate (SHGB); 2. Based on Decision No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks., *jo.* Decision No. 591/PDT/2022/PT.BDG., the legal consequences between the Deed of Sale and Purchase (AJB) and the Certificate of Building Use Rights (SHGB) which had expired on the same land object is that a Building Use Rights Certificate (SHGB) which had expired cannot be enforced as a basis for ownership rights.

The conclusion that can be drawn based on this research is that the Bandung High Court Decision Number 591/ PDT/2022/PT BDG., dated 10 November 2022, which overruled the Decision of the Bekasi District Court Number 571/Pdt.G/2021/PN Bks., dated 8 August 2022, shows several differences of opinion in legal considerations, including: a. Differences regarding the object of the dispute; b. Differences regarding the parties to the dispute; c. Differences regarding the principle of *nebis in idem*. Apart from that, the claim carried out by PT. Bangun Tjipta Pratama as the owner of Building Use Rights Certificate (SHGB) No.7/Bojong Menteng as a result of the *Ruislag* of the Ministry of Public Works is an act that fulfills the elements of an unlawful act (torts), where the land ownership rights are on land belonging to Rekson Sitorus. This could happen because of a possible unlawful act (torts) carried out by the Bekasi National Land Agency which issued a Building Use Rights Certificate (SHGB) No. 7/Bojong Menteng on land belonging to Rekson Sitorus which resulted in Rekson Sitorus being the rightful owner of the land object cannot register his land rights to the state.

Keywords: Building Use Rights Certificate, Legal Standing, Sale and Purchase Deed.

(F) Reference : 50 (1950 – 2023)
 (G) Lecturer : Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H
 (H) Author : Gerardus Aldo Salim

Pernyataan

Nama : GERARDUS ALDO SALIM
NIM : 217211032
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : KEDUDUKAN HUKUM ANTARA AKTA JUAL BELI DAN SHGB DALAM SUATU SENGKETA KEPEMILIKAN (Studi Kasus Putusan No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks jo. Putusan No. 591/PDT/2022/PT.BDG)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 05-Januari-2024
Yang menyatakan



GERARDUS ALDO SALIM
NIM. 217211032

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab karena kasih dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM ANTARA AKTA JUAL BELI DAN SHGB DALAM SUATU SENGKETA KEPEMILIKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks jo. PUTUSAN NO. 591/PDT/2022/PT.BDG)”**. Penulisan Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara. Penyusunan Tesis ini telah penulis susun dan selesaikan dengan maksimal, tentunya penulis tidak sendiri saat menyusun Tesis ini. Penulis telah dibantu berbagai pihak saat menyusun Tesis ini, sehingga Tesis ini dapat diselesaikan. Untuk itu, penulis sangat ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, terutama kepada yang saya hormati :

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Doktor Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis dalam penyusunan Tesis ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih dengan segala pengetahuan, kesabaran, waktu, dan atensi yang diberikan beliau kepada penulis dalam waktu yang tidak singkat.
5. Seluruh Dosen dan Staf di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara atas informasi, ilmu dan pengalaman yang telah diberikan.
6. Kepada Ayah penulis, dr. Ignatius Danny Salim, M.M., yang telah banyak memberikan dukungan secara moral, dukungan

doa, dan materi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Tesis ini.

7. Kepada Ibu penulis, dr. Brigita Henny Wiliani, M.Kes., yang telah banyak memberikan dukungan secara moral, dukungan doa, dan materi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Tesis ini.
8. Kepada adik-adik penulis, dr. Nicolas Reinhart Salim dan Angeline Michelle Salim, yang telah banyak memberikan dukungan secara moral dan doa kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Tesis ini.
9. Kepada senior saya, Nirwamudin, S.H., M.H., yang telah banyak memberikan dukungan, baik secara pemikiran, tenaga, moral, dan doa dalam pengerjaan Tesis ini.
10. Kepada sahabat-sahabat dan rekan-rekan advokat yang telah memberikan dukungan baik secara pemikiran, tenaga, moral, dan doa, Ganesha Bimaputra, S.E., Christoforus Rana Perkasa, S.E., Mutiara Putri Yolanda, S.H., Nilam Diniatika, S.H., dan Dicky Wiratama, S.H., serta dukungan dari sahabat-sahabat dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam pengerjaan Tesis ini.
11. Kepada teman-teman di Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara, Winda Puspitasari Ismail, S.H., M.Kn. dan Lorraine Anggi Taruli Hutagalung, S.H., M.Kn., serta seluruh teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan, baik pemikiran, tenaga, moral, dan doa untuk menyelesaikan Tesis ini kepada penulis.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Saya selaku penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan

ketidaksempurnaan dalam pembuatan Tesis ini, maka dari itu saya mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga karya Tesis ini dapat bermanfaat dalam memberikan tambahan wawasan bagi para pembaca.

Jakarta, 05 Januari 2024

Penulis,

Gerardus Aldo Salim
217211032

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
LEMBAR PERNYATAAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
D. Kerangka Konseptual.....	16
E. Landasan Teori	23
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan Pustaka Tentang Kedudukan Hukum.....	31
B. Tinjauan Pustaka Tentang Hak Atas Tanah.....	37
C. Tinjauan Pustaka Tentang Akta Jual Beli	44
D. Tinjauan Pustaka Tentang Peran Notaris dalam Penyusunan Akta Jual Beli.....	51
E. Tinjauan Pustaka Tentang Sertifikat Hak Guna Bangunan	69
F. Sertifikat Hak Guna Bangunan Sebelum Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	75
G. Sertifikat Hak Guna Bangunan Sesudah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	82
BAB III KAJIAN HASIL PENELITIAN DATA	88
A. Objek Penelitian.....	88
1. Dasar Perolehan Akta Jual Beli No. 315/AD/2/Jatiasih/1994 dengan NOP : 32.18.011.005.017-0001.0	88
2. Dasar Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7/Bojong Menteng Tahun 1993.....	89
3. Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks.....	90
4. Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi No. 591/PDT/2022/PT.BDG	107
BAB IV ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN	113
A. Analisis Kedudukan Hukum Akta Jual Beli Dibandingkan Dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Telah Habis Masa Berlakunya Terhadap Objek Tanah Yang Sama Berdasarkan Putusan No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks jo. Putusan No. 591/PDT/2022/PT.BDG.....	113
B. Analisis Akibat Hukum Antara Akta Jual Beli Dibandingkan Dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Telah Habis Masa Berlakunya Terhadap Objek Tanah Yang Sama Berdasarkan Putusan No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks jo. Putusan No. 591/PDT/2022/PT.BDG.....	135

BAB V PENUTUP	149
A. Kesimpulan	149
B. Saran	150
DAFTAR PUSTAKA.....	151
DAFTAR LAMPIRAN	158

